

Organisasi Profesi Kesehatan DIY Tolak RUU Kesehatan Omnibuslaw

YOGYA (KR) - Organisasi Profesi Kesehatan DIY yang terdiri dari dokter (IDI), bidan (IBI), apoteker (IAI), perawat (PPNI), terapis gigi mulut (PT-GMI), psikolog (IPK), ahli gizi (Persagi) dan penata anestesi (IPAI) menyatakan sikap terkait Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibuslaw, Jumat (18/11) siang.

Mereka menolak adanya Omnibuslaw tersebut karena tidak melihat adanya urgensi sekaligus tak adanya keterlibatan organisasi profesi dalam proses penyusunan nas-kahnya.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah DIY, Joko Murdiyanto mengatakan pi-haknya menilai Omnibuslaw tidak cukup urgensinya untuk masuk Prolegnas 2022-2023. UU Kesehatan yang saat ini ada dinilai sudah berjalan baik dan efektif mengatur seluruh kinerja kesehatan.



KR-Herminanto
Sejumlah perwakilan organisasi profesi kesehatan di DIY menyampaikan pernyataan sikap.

"Ada naskah akademik dari rancangan itu tidak tahu siapa yang buat, tidak ada yang bertanggungjawab. Ada 454 pasal RUU itu siapa yang buat tidak tahu. Karena isi rencana RUU Kesehatan Omnibuslaw kita tidak tahu, kami tidak bisa menjamin pelayanan untuk masyarakat. Pengurus pusat terus mengkaji dan lobi, naskah beredar tapi sekarang

ada rapat dengar pendapat. Ini dampak pergerakan organisasi profesi dan didengarkan karena gaungnya seluruh Indonesia. Taruhannya masyarakat yang terdampak," sambungnya.

Ketua DPW PPNI DIY, Tri Prabowo menambahkan pi-haknya siap bergerak dan mengawal aspirasi yang disampaikan saat ini. Menurut Tri, organisasi profesi harus dilibatkan dalam proses pembentakan perundangan agar segala sesuatu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. **(Fxxh)-f**

Partisipasi

ASN memiliki asas netralitas yang dianut dalam Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Adapun aparatatur Pemerintahan Kalurahan dimana di dalamnya adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan juga menjadi perhatian khusus terkait netralitasnya dalam pelaksanaan Pemilu seperti yang tercantum dalam Pasal 29, 51, dan 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. "Bahwa Lurah dan Pamong Kalurahan dilarang menjadi pengurus partai politik dan ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan

kepala daerah," jelasnya.

Sosialisasi menghadirkan Anggota Komisi A DPRD DIY M Syafi'i, Ketua Bawaslu DIY Sutrisnowati dan Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan.

Anggota Komisi A DPRD DIY M Syafi'i mengatakan, dalam setiap pelaksanaan Pemilu diharapkan dapat mengubah kondisi bangsa ke arah lebih baik. Apalagi dana yang digelontorkan sangat besar, mencapai puluhan triliun. "Ini sangat besar. Jangan sampai hasilnya hanya menyisakan konflik saja. Menjadi PR bersama bagaimana kita bisa menghilangkan kata konflik dalam benak," ujarnya.

Dari KPU DIY lebih banyak menjelaskan mengenai isu-isu strategis tentang peraturan KPU tentang pembentukan dan tata kerja badan Adhoc penyelenggara Pemilu dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dijelaskan Ketua KPU DIY

Hamdan Kurniawan, munculnya peraturan KPU tersebut merupakan penggabungan antara regulasi pembentukan dan tata kerja badan Adhoc Pemilu dengan regulasi pembentukan dan tata kerja badan Adhoc pemilihan.

"Penggabungan ini bertujuan untuk penyesuaian visi keserentakan dengan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola Badan AdHoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Selain itu juga penyesuaian hasil evaluasi pada Pemilu dan Pemilihan sebelumnya," katanya.

Ketua Bawaslu DIY Sutrisnowati mengungkapkan, politik uang masih menjadi tantangan terbesar pada Pemilu maupun Pilkada 2024. Di samping itu masih adanya diisiformasi, hoaks, politisasi sara, ujaran kebencian hingga netralitas ASN/TNI/Polri/Aparatur Pemerintah Desa. **(Awh)-d**

Diduga

Meski demikian lurah tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Kemungkinan lurah tersebut juga akan mendapat teguran jika pihak developer terbukti menyelewengkan izin pemanfaatan,"

Menjaga

atau penggalangan dukungan terhadap calon tertentu. Juga tidak ada *money politic* di arena muktamar. Semua itu menunjukkan bahwa kehormatan (*marwah*) Muhammadiyah selalu terjaga dalam setiap muktamar.

Pada konteks itulah Mitsuo Nakamura dalam *The Crescent Arises Over the Banyan Tree: A Study of Muhammadiyah in A Central Java* (1976), menyimpulkan bahwa secara organisatoris Muhammadiyah tampak sangat mengesankan dan disiplin. Meski sejatinya tidak ada alat pendisiplinan yang efektif selain kesadaran dan pengabdian setiap anggotanya. Dalam kesempatan lain, Hajriyanto Y Thohari (2016) juga membuat narasi menarik mengenai nilai-nilai unggul Muhammadiyah. Menurut Hajriyanto, ada beberapa nilai-nilai unggul Muhammadiyah yang perlu dirawat.

Pertama, disiplin. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang sangat disiplin. Selepas muktamar segera diikuti Musyawarah Wilayah (Musywil), Musyawarah Daerah (Musyda), Musyawarah Cabang (Musycab), dan Musyawarah Ranting (Musyran). Dalam hal pemanfaatan waktu, Muhammadiyah juga mampu menjaga kedisiplinan atau budaya tepat waktu. Rapat dan kegiatan di organisasi selalu dilaksanakan dengan waktu-waktu yang jelas.

paparnya.

Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X kembali menegaskan akan menindak tegas bahkan melakukan proses hukum bagi mereka yang telah menyalahgunakan paman-

faatan Tanah Kas Desa. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi penyalahgunaan kewenangan dalam pemanfaatan TKD. Apalagi sudah ada aturan jelas berkaitan dengan pemanfaatan TKD. **(Ria)-f**



Zahrotus Sa'adah, SIKom MA
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

TANGGAL 20 November merupakan Hari Anak Sedunia atau World Children's Day. Penetapan peringatan tersebut tidak lain karena adanya harapan dunia terhadap

Eksistensi Power (Park) Rangers

kesejahteraan anak. Untuk itu demi mewujudkan harapan tersebut maka Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Hak Anak sedunia yakni pada tanggal 20 November 1959. Selain itu, pada tanggal yang sama di tahun 1989, Majelis Umum PBB juga mengadopsi konvensi hak anak. Adanya deklarasi tersebut merupakan bukti bahwa anak-anak wajib mendapatkan hak-hak mereka. Adapun hak mereka meliputi: hak mendapatkan identitas, hak memilih kewarganegaraan, hak memperoleh perlindungan, hak memperoleh makan,

hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan keamanan, hak untuk kesamaan, hak untuk berperan dalam pembangunan, hak untuk bermain dan hak rekreasi.

Berdasarkan hak-hak tersebut, maka pemerintah diwajibkan untuk memfasilitasi seperti dalam pemberian pendidikan gratis, memberikan layanan kesehatan gratis untuk anak, memberikan kemudahan dalam pengurusan identitas anak dan memberikan fasilitas bermain serta rekreasi yang aman dan nyaman bagi anak. Dengan adanya upaya-upaya tersebut diharapkan anak-anak dapat memperoleh hak-hak mereka dengan

sangat baik dan layak.

Akan tetapi, dewasa ini taman bermain atau rekreasi yang ramah anak sulit untuk ditemukan. Secara fasad memang banyak taman wisata yang memberikan fasilitas memadai untuk anak, namun secara kondisi masih ada taman-taman yang tidak memadai, sebab banyak ditemukan pemandangan yang tidak layak, seperti perilaku mesum yang acapkali ditemukan di beberapa sudut taman. Perihal ini cukup memprihatinkan dan tentunya membuat beberapa orang tua menjadi waspada ketika mengajak anak-anak mereka menikmati fasilitas umum tersebut. Alhasil, beberapa orang tua memilih

mengajak anak-anak mereka ke mall atau bermain smartphone di rumah.

Adanya taman wisata yang tidak ramah tersebut umumnya terjadi karena tidak adanya keberadaan Park Ranger atau biasa dikenal dengan penjaga taman. Sejauh ini, tidak semua orang mengenal Park Rangers sebab masih banyak taman yang tidak difasilitasi dengan keberadaan mereka. Padahal keberadaan Park Rangers sangat penting, tidak hanya berkaitan dengan menjaga keamanan dan menjadi guide saja, namun Park Rangers juga dapat memberikan kenyamanan tempat tersebut

melalui pantauan mereka jika terdapat tindakan asusila. Dampak positifnya, anak-anak dapat menerima hak mereka untuk menikmati taman bermain.

Di sisi lain, bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan ketertiban, keberadaan Park Rangers tidak lebih seperti pengganggu yang acapkali menegur hal-hal yang mereka anggap tidak penting. Karena itu tidak heran jika Park Rangers jarang sekali ditemukan di beberapa taman bermain. Perihal ini seharusnya menjadi evaluasi, terutama bagi pemerintahan daerah, baik terkait bagaimana mereka mengenalkan Park Rangers atau memberikan

sosialisasi terhadap Park Rangers terkait bagaimana memberikan teguran yang baik terhadap pengunjung taman wisata. Sebab dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan taman-taman di beberapa wilayah Indonesia menjadi taman yang layak untuk dikunjungi oleh keluarga terutama anak-anak. Dengan demikian anak-anak akan lebih mengenal dunia luar dibandingkan berkat dengan smartphone mereka dan anak-anak pun secara tidak langsung menerima hak bermain dan rekreasi mereka secara layak.***

Indonesia Harus Antisipasi Kondisi Ekonomi Global

NUSA DUA (KR) - Bank Indonesia (BI) mengadakan flagship diseminasi, Laporan Nusantara, dan launching Buku Penguatan Struktur Ekonomi Indonesia dan Pariwisata Indonesia di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Jumat (18/11). Kegiatan tersebut dihadiri 130 peserta wakil akademisi, pengusaha, kementerian/lembaga dan BI baik kantor pusat maupun kantor perwakilan daerah.

"Pemulihan ekonomi domestik yang terus berlangsung tidak terlepas dari perbaikan kondisi makroekonomi secara spasial. Pemulihan ekonomi kewilayahan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses perumusan kebijakan di Bank Indonesia," kata Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo di Nusa Dua Bali, Jumat (18/11).

Menurut Budi, Laporan Nusantara merupakan pandangan BI terhadap dinamika perekonomian dalam perspektif spasial yang disarikan dari hasil asesmen dan analisa yang komprehensif dari seluruh Kantor Perwakilan BI di daerah. Dengan adanya Laporan



KR-Istimewa
Dody Budi Waluyo bersama narasumber dan moderator seminar.

Nusantara diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga bagi stakeholders, baik di tingkat pusat maupun daerah mengenai dinamika terkini, tantangan, dan prospek perekonomian daerah.

Setelah peluncuran Laporan Nusantara dan kedua buku tersebut, dilanjutkan seminar dengan narasumber Solikin M Juхро (Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI), Teguh Dartanto (Dekan FBE UI), Irwandy (Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara) dan Agustini Rahayu (Direktur Kajian Strategis, Kemenparekraf/Bapar-

ekraf), dengan moderator Ade Mulia.

Solikin M Juхро menyatakan, pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 diperkirakan menurun dari tahun 2022, disertai risiko resesi di beberapa negara. Di samping pertumbuhan ekonomi yang melambat juga disertai kecenderungan inflasi yang meningkat. Indonesia harus mengantisipasi kondisi ekonomi global di tahun mendatang. Sampai dengan Triwulan III-2022, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,72 persen (yoy) dan lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,45 persen (yoy). **(Ria)-d**

2 Perempuan

Pembukaan

Sebelumnya di Gedung Djazman Alkindi, dalam Pidato iftitah Pembukaan Sidang Tanwir Muhammadiyah, Ketum PP Dr Haedar Nashir mengemukakan, masyarakat kini banyak yang haus nilai-nilai agama, spiritual yang dalam lululintas paham keagamaan begitu luas spektrumnya. Muhammadiyah ke depan harus hadir menanamkan nilai-nilai Islam yang mendeduhkan dan mencerahkan. Oleh karena itu, menurut Haedar, Muhammadiyah harus memperkuat basis jamaah, akar rumput, masjid dan musala sebagai benteng keberadaan umat dan bangsa.

"Bila akar rumput di bawah mengalami ketercerabut di tengah gelombang saat ini, bukan hanya Muhammadiyah, tapi umat Islam dan

Qatar

seluruh penjualan alkohol meski merupakan salah satu sponsor utama tumamen itu.

Budweiser selaku salah satu sponsor utama Piala Dunia, memiliki hak eksklusif penjualan bir di perimeter stadion sepanjang turnamen, tiga jam sebelum dan satu jam setelah pertandingan.

Namun, kebijakan tersebut direvisi setelah negosiasi panjang yang dilakukan Presiden FI-

FA Gianni Infantino, Budweiser dan eksekutif Komite Tertinggi Qatar, selaku penyelenggara Piala Dunia 2022.

Meski demikian penjualan alkohol masih diizinkan tersedia di beberapa zona supporter, suite VIP di stadion dan di beberapa bar serta hotel. Qatar memperkirakan bahwa lebih dari satu juta supporter akan datang untuk menyaksikan Piala Dunia. **(Ant)-d**

Tunjangan

"Alhamdulillah kita sudah sampai pada tahap penempatan anggaran TPG PAI Non-PNS serta Tukin terutang Guru dan Pengawas PAI PNS ke DIPA Kanwil. Terima kasih atas kesabaran para Guru dan Pengawas PAI yang berhak untuk menerimanya," jelasnya.

Atas nama Kementerian Agama, ia mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BP-KP), Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, serta semua pihak yang telah ikut terlibat dalam proses pendataan, review sampai pada penempatan anggaran di Kanwil Kemenag Provinsi.

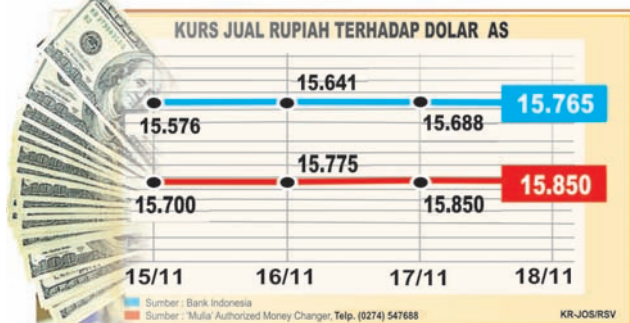
Direktur Pendidikan Agama Islam Amrullah menambahkan, untuk pemenuhan pembayaran TPG PAI, Kemenag telah menempatkan Rp 205 miliar lebih ke dalam DIPA Kanwil Kemenag Provinsi.

Sementara anggaran untuk pembayaran tunggakan Tukin terutang Guru dan Pengawas PAI tahun anggaran 2018-2020, jumlahnya sebesar Rp 7.194. 007.436. "Dana Tukin terutang ini tersebar ke enam provinsi, yakni Lampung, Jambi, Jabar, Riau, Sumatera Selatan, dan NTT," imbuhnya.

Menurut Amrullah, angka tersebut berdasar usulan dari daerah dan data dukung yang relevan. "Usulan yang diajukan kepada Kementerian Keuangan berdasarkan usulan yang sama dari Kantor Kementerian Agama Provinsi pengusul. Basis data yang digunakan untuk verifikasi dan

hal terkait adalah Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA) dan Laporan BPKP atas Review Tunggakan Tukin Guru dan Pengawas PAI," katanya.

Dalam proses pengusulan hingga pembayaran TPG dan Tukin ini, kata Amrullah, aspek transparansi dan integritas selalu menjadi perhatian pokok Kemenag. "Kami memastikan tidak ada pungutan liar dan pemotongan dalam proses pembayaran TPG dan Tukin ini. Sistem pembayaran akan dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat," tandasnya. **(Ati)-f**



Creative Economy Park